

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari beberapa Kabupaten yaitu, Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tojo Una-una, Buol, Donggala, Sigi, Toli-toli. Berbicara tentang Kerajaan yang berada di Kabupaten Morowali sangat bagus untuk di teliti, maka yang terlintas dalam pemikiran adalah Suku Bungku. Suku ini merupakan mayoritas penduduk Kabupaten Morowali.

Sejarah Sulawesi Tengah belum banyak membicarakan Kerajaan Bungku dibagian timur Sulawesi tengah, padahal Kerajaan Bungku memiliki sumber-sumber sejarah yang memadai dan memiliki perkembangan yang turut mempengaruhi kawasan ini dari masa ke masa. Bungku sebagai suatu kerajaan berdiri pada tahun 1672 oleh Peapua Lamboja yang menjadi Peapua atau Raja Bungku yang berasal dari suku To Rوتا yang berasal dari peradaban “Wawa Inia Rahampu’u Matano”¹ hingga Raja terakhir Peapua Abdurabbie pada tahun 1941 sebuah perjalanan sejarah panjang yang berjalan selama 269 tahun.

Kerajaan Bungku merupakan salah satu kerajaan Lokal di Sulawesi yang memiliki karakter Islam yang unik dan memiliki spesifikasi struktur pemerintahan lengkap untuk dipelajari. Kerajaan Bungku dipimpin oleh seorang Raja yang disebut “Pe’a Pua” yang dihitung sejak Pe’a Pua Lamboja di lanona

¹ Iwan Sumatri, “*The origins of Complex Society in South Sulawesi (OXIS project)*,” laporan penelitian peninggalan sejarah dan purbakala, penelitian kerja sama Pusat Arkeologi Makassar dan The Australia National University.

hingga Pe'a Pua Abdurabbie sebagai Raja Terakhir di Marsaole. Kerajaan Bungku didukung oleh sistem birokrasi kerajaan yang terdiri atas Pua atau Raja, komisi "opaa" yang terdiri atas "Bobatu Junia dan Bobatu Akherati". Konsep-konsep ini merupakan konsep lokal yang harus direkonstruksi kembali karena memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Konsep-konsep lokal ini nantinya bertambah sekaligus berubah ketika Kesultanan Ternate melakukan ekspansi penerapan konsep-konsep Ternate seperti "sangaj". Hal ini menjadi bukti perubahan penting yang terjadi di Kerajaan Bungku.

Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau aturan yang mengatur berjalannya suatu pemerintahan di sebuah wilayah atau Negara. Sistem pemerintahan yang kita ketahui di dunia ini sangat beragam. Pada masa masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam, maka kerajaan bercorak Hindu-Budha akhirnya tergantikan dengan sistem pemerintahan kerajaan yang bercorak Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini tertarik untuk mengenal lebih jauh bagaimana Kerajaan Bungku pada masa sistem pemerintahan Raja Abdurabbie dalam segi ekonomi dan sosial maka perlu dilakukan penelitian dengan formulasi judul ***"Kerajaan Bungku pada masa Pemerintahan Abdurabbie Tahun 1941-1950"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Awal Pemerintahan Kerajaan Bungku Pada Masa Abdurabbie
2. Bagaimana Kehidupan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Abdurabbie
3. Bagaimana Kehidupan Sosial Masyarakat Pada Masa Abdurabbie

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Awal Pemerintahan Kerajaan Bungku Pada Masa Abdurabbie
- b. Untuk Mengetahui Kehidupan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Abdurabbie
- c. Untuk Mengetahui Kehidupan Sosial Masyarakat Pada Masa Abdurabbie

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menjadikan sebagai referensi dari penulisan selanjutnya, berkaitan tentang raja-raja yang pernah menjabat dikerajaan bungku serta kehidupan pemerintahan politik, ekonomi dan sosial.

- b. Bagi mahasiswa Sulawesi tengah khususnya masyarakat dan mahasiswa morowali dapat di jadikan sebagai pegangan dalam mempertahankan nilai kebudayaan daerah khususnya generasi muda untuk menghayati, menghargai dan mempertahankan nilai budaya daerah sebagai puncak untuk menunjukan kebudayaan nasional.

D. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini agar penelitian mempunyai arah yang jelas dan pasti, maka perlu diberikan batasan masalah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada, maka pengkajian dan pembatasan masalah meneliti pada :

1) *Scope Kajian*

Scope Kajian disini menunjukan pada bidang histori atau yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah Kerajaan Bungku pada masa pemerintahan Abdurabbie dari segi ekonomi dan sosial.

2) *Scope Spasial*

Scope Spasial dalam penelitian ini difokuskan di Kabupaten Morowali karena peneliti berasal dari daerah tersebut, sehingga merasa perlu untuk mengambil bagian dalam melestarikan dan menyajikan Kerajaan Bungku.

3) *Scope Temporal*

Aspek Temporal (pembatas waktu), dimana dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan Kerajaan Bungku pada masa pemerintahan Abduraabbie 1941-1950.

E. Tinjauan Pustaka dan Sumber

Penelitian ini menggunakan beberapa buku dan artikel ilmiah, beberapa buku yang relevan dengan judul penulisan ini, tentunya juga berkaitan erat dengan Sejarah Kerajaan Bungku dan Suku Bungku, serta dukungan teori yang dapat dijadikan referensi yang menunjang melalui pengkajian dan penelaan yang mendalam demi menghasilkan sebuah penulisan yang tidak asal-asalan. Seperti buku tulisan Syakir Mahid, Haliadi-Sadi, Wilman Darsono, sebagai para penulis sejarah yang menjelaskan Sejarah Kerajaan Bungku dan Suku Bungku.

Tinjauan dari buku Sejarah Kerajaan Bungku dari Sulawesi Tengah yang ditulis oleh Syakir Mahid, Haliadi-Sadi, Wilman Darsono yang diterbitkan Penerbit Ombak di Yogyakarta pada tahun 2012.

Pada arsip Sulawesi Tengah atau *Midden Celebbes* pada masa Hindia Belanda, Kerajaan Bungku telah memiliki endapan arsip untuk dikaji sebagai bahan sumber primer sejarah Kerajaan Bungku. Ada juga arsip sebagai endapan atau catatan-catatan penting yang pernah berkunjung ke Kerajaan Bungku, antara lain: Albertus Jacobus Duymaer van Twist, F.S.A. de Clerq, Pieter Bleeker, dan P.van der Crab. Laporan dari Albertus Jacobus Duymaer van Twist yang berjudul *Aanteekeningen betreffende een reis door de Molukken*, 's Gravenhage pada tahun 1856, de Clerq, F.S.A. yang berjudul "*Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*," Pieter Bleeker yang berjudul "*Reis door de Minahasa en Molukschen Archipel, gedaan in de maanden September en Oktober 1855*," dan P.van der Crab yang berjudul "*De Moluksche eilanden: Reis van Z.E. den Gouvernuer Generaal C.F. Pahud*," I. Grenzen yang berjudul, "*Het Landschap Boengkoë*,"

IV, pada 1908 hlm 489-521. Koleksi arsip *Agemeen Secretarie* dari 1892 hingga 1941 wilayah ini telah disebut-sebut sebagai daerah yang juga menjadi pusat perhatian Hindia Belanda. Arsip itu antara lain: Agenda nomor 31377/36 tentang kewajiban-kewajiban Raja Bungku, MGS 21 Juli 1900 nomor 17 dan 19 tentang nota penjelasan tentang daerah Tombuku, Renvoi 9 Maret 1896 nomor 4657 Kerusuhan di daerah Sakita, Agenda 9 April 1907 nomor 8694 penggabungan Mori dan Bungku, dan lain sebagainya.

Kerajaan Bungku sebagai suatu kerajaan yang berdaulat dan memiliki hubungan dengan Kerajaan lainnya seperti: Kerajaan Mori, Kerajaan Banggai, Kerajaan Buton, Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, Kerajaan Konawe, dan Kerajaan Ternate. Bentuk hubungan tersebut dapat berupa hubungan

Pengembangan keagamaan, hubungan koneksitas sosial-kemasyarakatan, hubungan ekspansi politik, dan hubungan kebudayaan yang sama.

F. Kerangka Teoretis dan Pendekatan

Penelitian ini adalah studi sejarah sosial yang mengungkapkan apa yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat.

1. Perubahan Sosial dan Kebudayaan

a. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selain itu perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material dan imaterial, yang ditentukan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.²

² Soejono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Skripsi tidak di terbitkan. hlm 304

Sartono Kartodirdjo (2013 : 5) bahwa perubahan sosial mencakup permasalahan-permasalahan diantaranya adalah proses akulturasi yang merupakan suatu proses yang mencakup usaha masyarakat menghadapi pengaruh kultural dari luar dengan mencari bentuk penyesuaian terhadap komunitas, nilai, dan ideology baru, suatu penyesuaian berdasarkan kondisi, posisi dan referensi kulturalnya yang semuanya merupakan faktor-faktor kultural yang menentukan sikap terhadap pengaruh baru. Sebagai kondisi konsekuensi terhadap pengaruh baru, maka masyarakat yang tadinya lebih homogen menjadi heterogen. Salah satu dampak dari situasi ini ialah timbulnya konflik sosial, suatu gejala yang menyerupai perubahan sosial.³

Segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan disuatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok dan masyarakat. Secara umum dapat dipahami bahwa perubahan sosial terjadi karena pengaruh dari dalam masyarakat tersebut, oleh karena faktor unsur-unsur budaya yang semakin kuat dalam mempengaruhi masyarakat. Pengertian perubahan sosial dan budaya hal yang berubah itu adalah unsur-unsur budayanya, seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat.⁴

Sartono Kartodirdjo (2014 : 135)

1. Sejarah deskriptif-naratif sudah tidak memuaskan lagi untuk menjelaskan pelbagai masalah atau gejala yang serba kompleks. Oleh karena objek yang

³ Sarjono Kartodirdjo. 2003. *Pengantar Antropologi*. Skripsi tidak diterbitkan. hlm 5

⁴ Yad Mulyadi.1999. *Antropologi*, hlm. 60

demikian memuat pelbagai aspek atau dimensi permasalahan maka konsekuensi logis ialah pendekatan yang mampu mengungkapkannya.

2. Pendekatan multidimensional atau social scientific adalah yang paling tepat untuk dipergunakan sebagai cara menggarap permasalahan atau gejala tersebut di atas.
3. Ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang merupakan alat analitis yang relevan sekali untuk keperluan analisis historis.
4. Lagi pula, studi sejarah tidak terbatas pada pengkajian hal-hal inofatif tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, tetapi juga ingin melacak pelbagai struktur masyarakat, pola kelakuan, kecenderungan proses dalam pelbagai bidang, dan lain-lain. Kesemuanya itu menuntut adanya alat analitis yang tajam dan mampu mengekstrapolasikan fakta, unsur, pola, dan sebagainya.⁵

Wilayah eks Kerajaan Bungku awalnya hanya dihuni oleh suku Bungku (To Bungku) yang ditambah oleh beberapa sub etnis seperti, To, Epe, To Fatu, To Madino, To Mbelala, To Koroni, dan To Wana. Wilayah yang subur dan strategis membuat berbagai kelompok suku berdatangan untuk mencari penghidupan dan menetap di wilayah eks Kerajaan Bungku Seperti Suku Bugis, Makassar, Buton, Toraja, Jawa, Cina, Arab, dan suku-suku lainnya. Akibatnya penduduk berkembang dengan pesat dan kehidupan mengikuti dinamika perkembangan zaman yang terjadi. Pada 1852 Bungku dihuni oleh 15.030 jiwa penduduk yang di tambah dengan Pulau Menui, sebanyak 13.411 jiwa. Perbatasan paling Utara

⁵ Sartono Kartodirdjo 2014. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. hlm. 135

Bungku di Distrik Toepe dan Toffi terletak di dekat teluk tomori dan Bungku ke bagian Selatan di distrik Bahu Solo. Distrik Bungku atau Tombuku, di samping daerah pantainya yang kaya dari Banggai sampai Tanjung Tapu-Ulono tempat negori Faya berada pada saat itu terdiri atas 18 negari dengan 9.687 penduduk. Distrik Bahusolo mencakup bagian pantai Selatan di Pantai Timur, terbentang dari tanjung Tapu Uluno sampai ke Pulau Lambiki (Lanbenke), tempat Lawui di mulai dan pada 1852 hanya memiliki 5 negeri di daratan pantai dengan 423 orang penduduknya.

Kemudian pada 1930 di katakana bahwa *Lanschap* Bungku yang yang terdiri atas Bahodopi, Bungku, Noord-Bungku, Salabangka, dan Wosu memiliki penduduk masing-masing Bahodopi sebanyak 4.394 jiwa, Bungku sebanyak 5.193, Noord-Bungku sebanyak 5.151 jiwa, Salabangka sebanyak 7.971 jiwa, wosu sebanyak 3.579 jiwa itu berarti pendduk pribumi Bungku pada tahun itu sebanyak 26.288 jiwa.⁶

Sejarah Bungku pasca kolonial sangat menarik untuk di ketahui, sehingga periode ini sengaja di masukan dalam satu bab pada buku Sejarah Bungku. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan unsur yang kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam

⁶ Syakir Mahid. 2012. *Sejarah Kerajaan Bungku*. hlm. 54-56

menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia II.⁷

Periode Revolusi di Bungku mengingatkan pada beberapa peristiwa penting yang kemudian menjadi tonggak perubahan di Bungku. Berawal dari kedatangan Belanda di Kerajaan Bungku. Sejak saat itu sudah ada perlawanan-perlawanan yang di lakukan oleh Raja Bungku, yakni Kurusi Ismail dan rakyatnya. Hal ini karena Belanda melancarkan kebijakan yang bersifat eksploitatif yang di ikuti dengan politik adu domba.⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian sejarah yang pada dasarnya adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, merupakan implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

a. Heuristik

Pada tahap Heuristik ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dan sumber dari berbagai tempat, dan diberbagai kesempatan, seperti melakukan pencarian data primer dan sekunder di Perpustakaan pusat Universitas Negeri Gorontalo, serta melakukan wawancara dengan tokoh baik pemerintahan, masyarakat, serta para pelaku dan pemerhati Suku Bungku yang ada di wilayah Morowali.

Proses pencarian data yang dilakukan diperpustakaan pusat Universitas Negeri Gorontalo, berhasil mendapatkan sumber sekunder, buku hasil penelitian terdahulu oleh para peneliti sejarah di Morowali, seperti buku Karya Syakir

⁷ M.C. Ricklefs, *Op.cit.* hlm. 446

⁸ Syakir Mahid. 2012. *Sejarah Kerajaan Bungku.* hlm. 376

Mahid, Haliadi-Sadi, Wilman Darsono, dan artikel-artikel yang terkait dengan Sejarah Bungku. Sumber Sekunder ini dapat mendukung serta merupakan satu dukungan yang dapat dijadikan sandaran dalam kepenulisan.

b. Kritik Sumber

Melakukan kritik sumber yaitu memilih dan melilah untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil, yang sudah terkumpul untuk memperoleh data yang benar dan dapat dipercaya, agar mampu menghasilkan data yang tidak tersangka oleh mereka yang berakal, dengan segala bukti yang tidak tertolak para pengkaji. Kritik sumber dapat dikelompokkan pada kritik ektern dan kritik intern.

- 1) Kritik Ektern merupakan suatu proses untuk melihat keaslian sumber, sebelum semua kesaksian yang dikumpulkan oleh peneliti dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat. Terutama dilihat dari kasat mata, apakah sumber ini fotocopy, tulisan tangan asli, stensilan. Apakah sumber itu dapat teruji kebenaran dan keasliannya atau ada yang menimbulkan kecurigaan seperti bekas tambahan tulisan, editan serta terdapat ketidak sesuaian antara sumber pada zamannya.
- 2) Kritik Intern bertujuan untuk mengkaji keaslian dan kebenaran data dan sumber. Peneliti harus menetapkan arti sebenarnya dari kesaksian itu, apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh saksi atau penulis. Karena bahasa statis selalu berubah, menentukan arti sebenarnya.

c. Interpretasi

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberikan makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Dan pada dasarnya proses kerja interpretasi sudah mewarnai tahap heuristik, tahap kritik sumber baik kritik eksternal maupun kritik internal dan tetap akan mewarnai tahap berikutnya, yakni tahap kerja penulisan (*Writing, historiography*), terutama dalam implementasi analisis-analisis, aksentuasi, generalisasi, inferensi, dan organisasi tulisan.⁹

d. Historiografi

Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi, yaitu kegiatan merekonstruksi peristiwa masa lampau dalam bentuk kisah sejarah yang harus dituangkan secara tertulis. Dalam hal ini bakat dan kemampuan menulis seorang peneliti sejarah sangat mewarnai tulisannya.¹⁰

Tahap akhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi (penulisan sejarah). Setelah sumber-sumber diverifikasi, maka sejalan dengan interpretasi, penyusunan penulisan sejarah mulai dilakukan. Langkah ini memerlukan pengetahuan penulis tentang tata cara penulisan dan juga penggunaan bahasa yang tepat, sederhana, mudah dipahami dan juga tidak melahirkan interpretasi yang ganda.

H. Jadwal Penelitian

Agar lebih efektif dalam penelitian maka perlu menggunakan waktu secara baik, maka peneliti menyusun jadwal penelitian untuk menjadi pegangan dalam

⁹ A. Daliman, 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. hlm 81-82

¹⁰ Helius Sjamsudin. *Metodologi Sejarah*. hlm. 121

penyelesaian penelitian ini agar sesuai dengan waktu yang direncanakan. (lihat Tabel 1).

Tabel 1.

Jadwal Penelitian

Waktu	Kegiatan			
	Heuristic	Kritik	Interpretasi	Historiografi
Maret	✓	✓		
April		✓		
Mei			✓	✓
Juni				✓

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi dengan judul *Kerajaan Bungku Pada Masa Pemerintahan Abdurabbie Tahun 1941-1950* ini terbagi dalam beberapa bab dan sub-bab.

Penulisan dalam penelitian ini akan dimulai dari:

Bab I Menguraikan Pendahuluan dengan Sembilan sub-bab meliputi : sub-bab pertama menguraikan latar belakang masalah, sub-bab kedua menguraikan rumusan masalah, sub-bab ketiga menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, sub-bab keempat menguraikan ruang lingkup, sub-bab kelima menguraikan tinjauan pustaka dan sumber, sub-bab keenam menguraikan kajian teoretis dan pendekatan ilmu, sub-bab ketujuh menguraikan metode penelitian, sub-bab

kedelapan menguraikan jadwal penelitian, dan sub-bab kesembilan menguraikan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang Gambaran Umum yang terdiri dari Dua sub-bab yaitu : sub-bab pertama menguraikan tentang lokasi penelitian, sub-bab kedua menguraikan tentang Kondisi Geografis.

Bab III menjelaskan tentang Berdirinya Kerajaan Bungku yang terdiri dari sub-bab berikut : sub-bab pertama menjelaskan Kerajaan Bungku, sub-bab kedua menguraikan tentang Nama-nama Raja Kerajaan Bungku, sub-bab ketiga menguraikan tentang Sistem Politik Kerajaan Bungku, sub-bab keempat menguraikan tentang Integrasi Sosial Politik Bungku Dengan Hindia Belanda, dan sub-bab kelima menguraikan tentang Bungku sebuah Kerajaan Maritim.

Bab IV menjelaskan tentang Pemerintahan Raja Abdurabbie yang terdiri dari sub-bab berikut : sub-bab pertama menjeaskan tentang Biografi Raja Abdurabbie, sub-bab kedua menjelaskan tentang Perpindahan Kekuasaan Kerajaan Bungku, sub-bab ketiga menjelaskan tentang Pemerintahan Raja Abdurabbie, sub-bab keempat menjelaskan tentang perekonomian, sub-bab kelima menjelaskan tentang sosial, sub-bab keenam menjelaskan tentang Adat Istiadat Masyarakat Bungku, sub-bab ketujuh Integrasi Bungku ke Pendudukan Jepang, dan sub-bab kedelapan Abdurabbie sebagai Kepala Swapraja Bungku.

Bab V adalah Penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.